

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Shofin, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2014.
- Ambarwati, R.A., F.I. Solikhah, N. Indriyani, D.A. Kumalasari, dan Dkk., *Pengelola Dana Desa*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2014.
- Bambang Hartono, *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- KPK, *Buku KPK Memahami Untuk Membasmi Korupsi*, 2006.
- P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, 1996.
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.
- Tolib Efendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2015.

Warso Sasongko, *Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Jurnal/Artikel

Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto),” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2, 2010: 83–84.

Alatas, M. A. M., Pawennei, M., & Kamal, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1556-1571.

Aviano, Vially, dan Lola Yustrisia, “Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 388–399.

Bambang Hartono, Aprinisa Aprinisa, dan Pascal Utama Mahendra, “Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk),” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (2024): 938–960.

Dedy Syaputra, “Analisa Ekonomi Atas Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 61.

Fabio Arya Danuwangsa, Bambang Hartono, dan Suta Ramadan, “Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.TJK),” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 172–184.

Fajar Panuluh, “Buku Pintar Dana Desa,” Proposal SIMLITAMAS, 2020: 8–37.

I Made Agus Mahendra Iswara dkk., “Kebijakan Pidana Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Patty Corruption) Dengan Pendekatan Kemanfaatan,” *Jurnal Hukum Saraswati* 3, no. 2 (2021): 50–51.

Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185-196.

McGee, R. W., Petrides, Y., & Gelman, W. (2022). If the punishment should fit the crime, how serious are 75 crimes? An empirical study. *European Journal of Economics, Law and Politics*, 9(2), 1-28.

Pangjaya, Anak Agung Ananda Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Nyoman Sujana, “Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pid.Sus/2017,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–6.

Pramaisella, Novenda Amellia Sandra, Nurul Umi Ati, dan Retno Wulan Sekarsari, “Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Batu),” *Jurnal Respon Publik* 15, no. 2 (2021): 87–97.

Rahmi Dwi Sutanti Pintar Marulam Purba, Purwoto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001,” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 1–21.

Siregar, Deny Setiawan, Madiasa Ablisar, dan Edi Yunara, “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023): 437–453.

Suta Ramadhan, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan,” *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 2, no. 1 (2022).

Wahyuningsih, Risky, dan Amir Faisal, “Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2022): 219–233.

Wardhana, Daniar Rasyid dkk., “Wewenang Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,” *Jurnal Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020).

Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 01-12.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 16
angka 3

Putusan Banding Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Smg

Putusan Kasasi Nomor 3415 K/Pid.Sus/2025 Jo. 31/Pid.Sus-TPK/2024/PT Smg Jo.
45/Pid Sus-TPK/2024/PN SMG

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013, tanggal 18
Januari 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001